

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan Penyusunan Perda tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

b. Misi

- 1) Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
- 2) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
- 3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
- 4) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
- 5) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi

Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam Penyusunan Perda tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- a) Inspektur (Eselon IIa)
- b) Sekretaris (Eselon IIIa) yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan (Eselon IVa)
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa)
 - 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan (Eselon IVa)
- c) Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon IIIa)
- d) Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon IIIa)
- e) Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon IIIa)

B. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. A. P. Pettarani No.100, Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian selama satu bulan di bulan Februari 2026. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada auditor sebagai responden sebanyak 62 namun data sampel yang kembali pada bulan tersebut hanya berjumlah 43, karena pada periode pengumpulan data terdapat beberapa hari libur nasional (tanggal merah) yang menyebabkan terbatasnya waktu operasional dan pengembalian data tidak berjalan secara optimal.

Tabel 4 Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	62
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(19)
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	(0)
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	43

Sumber : Data diolah, 2026

2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, kedudukan di inspektorat dan masa kerja.

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5 Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	26	60.5	60.5	60.5
	Perempuan	17	39.5	39.5	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer yang diolah

43 responden yang merupakan auditor dari kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terdiri 26 responden yang berjenis kelamin Laki-laki (60,5%) dan 17 responden yang berjenis kelamin perempuan (39,5%).

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 6 Jenjang Pendidikan Terakhir

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	18	41.9	41.9	41.9
	S2	25	58.1	58.1	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar auditor pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 18 auditor atau 41,9% dari jumlah responden. Sedangkan Tingkat pendidikan S2 sebanyak 25 auditor atau 58,1%.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Kedudukan

Tabel 7 Kedudukan di Inspektorat

Kedudukan Di Inspektorat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Auditor Madya	12	27.9	27.9	27.9
	Auditor Muda	18	41.9	41.9	69.8
	Auditor Pertama	13	30.2	30.2	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar auditor pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki kedudukan sebagai auditor muda sebanyak 18 auditor atau 41,9%, auditor pertama sebanyak 13 auditor atau 30,2%. Sedangkan kedudukan sebagai auditor madya sebanyak 12 auditor atau 27,9% dari total responden.

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 8 Lama Masa Kerja

Lama Masa Kerja					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<2 Thn	4	9.3	9.3	9.3
	>5 Thn	21	48.8	48.8	58.1
	2-5 Thn	18	41.9	41.9	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Tabel 8 menunjukkan sebagian besar auditor bekerja diatas 5 tahun, yaitu sebanyak 21 auditor atau 48,8% dari jumlah responden. Sedangkan yang bekerja selama 2 – 5 tahun yaitu sebanyak 18 auditor atau 41,9%, dan yang bekerja kurang dari 2 tahun sebanyak 4 auditor atau 9,3%.

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Internal	43	39.00	50.00	44.0698	2.97926
Whistleblowing	43	22.00	30.00	26.6977	1.99446
Moralitas Individu	43	23.00	30.00	26.3256	1.82210
Pencegahan Fraud	43	24.00	30.00	26.4651	1.90674
Valid N (listwise)	43				

Sumber : Data diolah, 2026

Tabel 9 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 9 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain :

a) Pengendalian Internal (X_1)

Berdasarkan tabel 9 diatas X_1 memiliki nilai minimum 39, nilai maksimum 50, dan *mean* 44,0698 dengan 10 item pertanyaan maka

($44,0698 : 10 = 4,40698$) sehingga 4,40698 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,97926 dari nilai rata-rata jawaban responden.

b) *Whistleblowing* (X_2)

Berdasarkan tabel 9 diatas X_2 memiliki nilai minimum 22 nilai maksimum 30, dan *mean* 26,6977 dengan 6 item pertanyaan maka ($26,6977 : 6 = 4,4496$) sehingga 4,4496 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1,99446 dari nilai rata-rata jawaban responden.

c) Moralitas Individu (X_2)

Berdasarkan tabel 9 diatas X_2 memiliki nilai minimum 23 nilai maksimum 30, dan *mean* 26,3256 dengan 6 item pertanyaan maka ($26,3256 : 6 = 4,3876$) sehingga 4,3876 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1,82210 dari nilai rata-rata jawaban responden.

d) Pencegahan *Fraud* (Y)

Berdasarkan tabel 9 diatas Y memiliki nilai minimum 24, nilai maksimum 30, dan *mean* 26,4651 dengan 6 item pertanyaan maka ($26,4651 : 3 = 4,4109$) sehingga 4,4109 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan

adanya penyimpangan sebesar 1,90674 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2. Hasil Uji Statistik Frekuensi

Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran distribusi data baik berupa ukuran gejala pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik frekuensi.

Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu : Pengendalian Internal (X1), *Whistleblowing* (X2), Moralitas Individu (X3) dan Pencegahan *Fraud* (Y). Hasil perhitungan statistik frekuensi masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Uraian singkat hasil perhitungan statistik frekuensi tersebut dikemukakan berikut ini.

a) Pengendalian Internal (X₁)

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personil lain, yang di rancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan (Holly & E. Daromes, 2023). Lingkungan pengendalian internal membentuk dasar perilaku dan etika dalam organisasi, sementara penilaian risiko membantu mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin menimbulkan *fraud*. Instrumen yang digunakan untuk mengukur

pengendalian internal terdiri dari 10 item pernyataan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap pengendalian internal dilihat pada tabel.

Tabel 10 Tanggapan Responden Mengenai Pengendalian Internal

Item		Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	N		
1	F %	0 0	0 0	0 0	36 83.7	7 16.3	43	179	4.1628
2	F %	0 0	0 0	0 0	18 41.9	25 58.1	43	197	4.5814
3	F %	0 0	0 0	0 0	19 44.2	24 55.8	43	196	4.5581
4	F %	0 0	0 0	0 0	20 46.5	23 53.5	43	195	4.5349
5	F %	0 0	0 0	2 4.7	21 48.8	20 46.5	43	190	4.4186
6	F %	0 0	0 0	1 2.3	21 48.8	21 48.8	43	192	4.4651
7	F %	0 0	0 0	2 4.7	25 58.1	16 37.2	43	186	4.3256
8	F %	0 0	0 0	0 0	20 46.5	23 53.5	43	195	4.5349
9	F %	0 0	0 0	1 2.3	28 65.1	14 32.6	43	185	4.3023
10	F %	0 0	0 0	0 0	35 81.4	8 18.6	43	180	4.1860
Mean variabel Pengendalian Internal									4.4070

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Tabel 10 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian kurang setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 10 pernyataan yaitu sebesar 4,4070 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju.

b) *Whistleblowing* (X2)

Whistleblowing adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh individu baik dalam maupun luar organisasi, dalam mengungkapkan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan (Fauziyah et al., 2021). Instrumen yang digunakan untuk mengukur *whistleblowing* terdiri dari 6 item pernyataan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap *whistleblowing* dapat dilihat pada tabel.

Tabel 11 Tanggapan Responden Mengenai *Whistleblowing*

Item		Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	N		
1	F %	0 0	0 0	2 4.7	13 30.2	28 65.1	43	198	4.6047
2	F %	0 0	0 0	0 0	19 44.2	24 55.8	43	196	4.5581
3	F %	0 0	0 0	3 7.0	21 48.8	19 44.2	43	188	4.3721
4	F %	0 0	0 0	0 0	17 39.5	26 60.5	43	198	4.6047
5	F %	0 0	0 0	1 2.3	24 55.8	18 41.9	43	189	4.3953
6	F %	0 0	0 0	0 0	36 83.7	7 16.3	43	179	4.1628
Mean variabel <i>Whistleblowing</i>									4.4496

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Tabel 11 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian kurang setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 6 pernyataan yaitu sebesar 4,4496 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju.

c) Moralitas Individu (X2)

Moralitas individu adalah prinsip yang dapat membimbing seseorang melakukan tindakan baik atau benar. Moralitas individu menunjukkan penilaian individu terhadap baik dan buruknya perilaku sehingga moralitas individu menjadi dasar etis dalam menentukan apakah tindakan layak diterima atau melanggar norma dan nilai yang berlaku (Nur et al., 2023). Instrumen yang digunakan untuk mengukur moralitas individu terdiri dari 6 item pernyataan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap moralitas individu dapat dilihat pada tabel.

Tabel 12 Tanggapan Responden mengenai Moralitas Individu

Item		Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	N		
1	F %	0 0	0 0	0 0.0	16 37.2	27 62.8	43	199	4.6279
2	F %	0 0	0 0	0 0.0	36 83.7	7 16.3	43	179	4.1628
3	F %	0 0	0 0	5 11.6	31 72.1	7 16.3	43	174	4.0465
4	F %	0 0	0 0	1 2.3	14 32.6	28 65.1	43	199	4.6279
5	F %	0 0	0 0	0 0	20 46.5	23 53.5	43	195	4.5349
6	F %	0 0	0 0	0 0	29 67.4	14 32.6	43	186	4.3256
Mean variabel Moralitas Individu									4.3876

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Tabel 12 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan

paling sedikit responden memberikan penilaian kurang setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 6 pernyataan yaitu sebesar 4,3876 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju.

d) Pencegahan *Fraud* (Y)

Pencegahan *Fraud*, merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menekan atau mencegah terjadinya kecurangan oleh pegawai, sehingga kerugian bagi perusahaan dapat diminimalisir dan operasional organisasi berjalan dengan lancar (Limbong, 2020) (Tunggal, 2012). Instrumen yang digunakan untuk mengukur pencegahan *fraud* terdiri dari 6 item pernyataan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap pencegahan *fraud* dapat dilihat pada tabel.

Tabel 13 Tanggapan Responden mengenai Pencegahan *Fraud*

Item		Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5	N		
1	F %	0 0	0 0	0 0.0	15 34.9	28 65.1	43	200	4.6512
2	F %	0 0	0 0	1 2.3	23 53.5	19 44.2	43	190	4.4186
3	F %	0 0	0 0	0 0	36 83.7	7 16.3	43	179	4.1628
4	F %	0 0	0 0	1 2.3	14 32.6	28 65.1	43	199	4.6279
5	F %	0 0	0 0	0 0	28 65.1	15 34.9	43	187	4.3488
6	F %	0 0	0 0	2 4.7	28 65.1	13 30.2	43	183	4.2558
Mean variabel Pencegahan <i>Fraud</i>									4.4109

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Tabel 13 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian kurang setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 3 pernyataan yaitu sebesar 4,4109 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju.

3. Hasil Uji Kualitas Data

a) Hasil Uji Validitas

Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji kolerasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan *pearson correlation*. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,3008.

Tabel 14 menunjukkan hasil uji validitas pada tiga variabel yang terdiri dari Pengendalian Internal (X1), *Whistleblowing* (X2,) Moralitas Individu (X3) dan Pencegahan Kecurangan (Y).

Tabel 14 Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan		r hitung	r tabel	Keterangan
X1	X1.1	0,396	0,3008	VALID
	X1.2	0,532	0,3008	VALID
	X1.3	0,769	0,3008	VALID
	X1.4	0,798	0,3008	VALID
	X1.5	0,800	0,3008	VALID
	X1.6	0,518	0,3008	VALID
	X1.7	0,495	0,3008	VALID
	X1.8	0,592	0,3008	VALID

	X1.9	0,484	0,3008	VALID
	X1.10	0,496	0,3008	VALID
X2	X2.1	0,734	0,3008	VALID
	X2.2	0,648	0,3008	VALID
	X2.3	0,731	0,3008	VALID
	X2.4	0,600	0,3008	VALID
	X2.5	0,621	0,3008	VALID
	X2.6	0,419	0,3008	VALID
X3	X3.1	0,513	0,3008	VALID
	X3.2	0,620	0,3008	VALID
	X3.3	0,671	0,3008	VALID
	X3.4	0,639	0,3008	VALID
	X3.5	0,661	0,3008	VALID
	X3.6	0,646	0,3008	VALID
Y	Y.1	0,465	0,3008	VALID
	Y.2	0,862	0,3008	VALID
	Y.3	0,493	0,3008	VALID
	Y.4	0,500	0,3008	VALID
	Y.5	0,777	0,3008	VALID
	Y.6	0,716	0,3008	VALID

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 14 diketahui bahwa variabel Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, Moralitas Individu dan Pencegahan *Fraud* memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $> 0,3008$) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid

b) Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistik *Cronbach*

Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih dari ($>$) 0,6. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengendalian Internal (X_1)	0,794	Reliabel
<i>Whistleblowing</i> (X_2)	0,702	Reliabel
Moralitas Individu (X_3)	0,684	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,712	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2026

Tabel 15 menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, Moralitas Individu dan Pencegahan *Fraud* mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dasar keputusannya yaitu jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data

penelitian berdistribusi normal dan sebaliknya. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.48914367
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.105
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Tabel 16 Uji Kolmogorov-Smirnov

Berdasarkan tabel 16 Kolmogorov-smirnov diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,086 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel

independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Sunjoyo, dkk, 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengendalian Internal	.918	1.089
	<i>Whistleblowing</i>	.916	1.092
	Moralitas Individu	.987	1.013

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

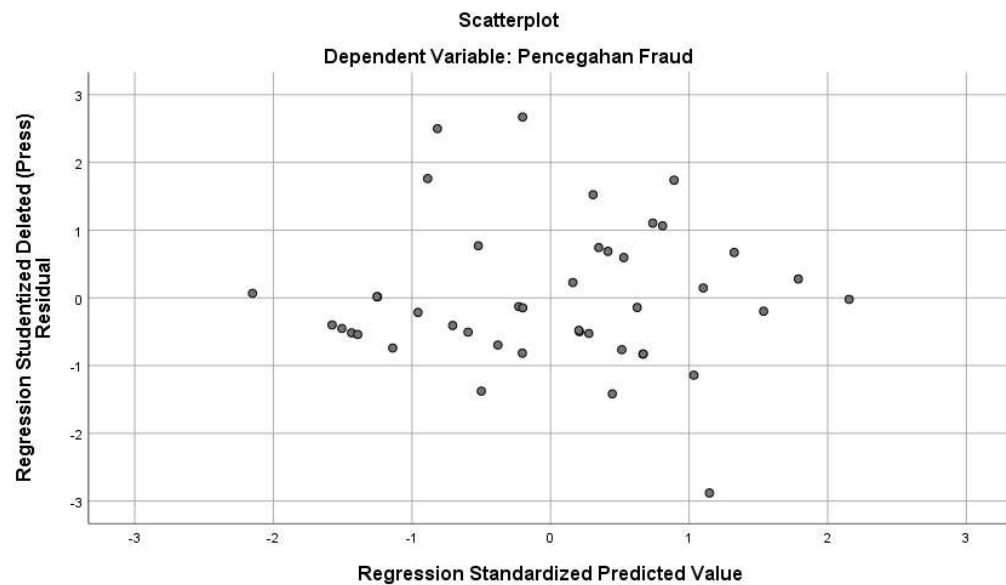
Sumber : Data yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 17, terlihat bahwa variabel pengendalian internal, *whistleblowing* dan moralitas individu memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola

tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat



Gambar 2. Grafik Scatterplot

pada gambar di bawah ini:

Berdasarkan gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pencegahan *fraud* dengan variabel yang mempengaruhi yaitu pengendalian internal, *whistleblowing* dan moralitas individu.

5. Hasil Uji Hipotesis

a) Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik,

maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 18 Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.979	5.167		.851
	Pengendalian Internal	.217	.084	.339	.013
	<i>Whistleblowing</i>	.301	.125	.315	.021
	Moralitas Individu	.300	.132	.286	.029

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber : Data yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,979 + 0,217 X_1 + 0,301 X_2 + 0,300 X_3 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta adalah 0,979 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (pengendalian internal, *whistleblowing* dan moralitas individu) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (pencegahan *fraud*) sebesar 0,979 satuan.
- 2) Koefisien regresi pengendalian internal (b_1) adalah 0,217 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,217 jika nilai variabel X_1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pengendalian internal (X_1) dengan variabel pencegahan *fraud* (Y).

Semakin baik pengendalian internal maka pencegahan *fraud* semakin meningkat.

- 3) Koefisien regresi *whistleblowing* (b_2) adalah 0,301 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,301 jika nilai variabel X_2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *whistleblowing* (X_2) dengan variabel pencegahan *fraud* (Y). Semakin tinggi *whistleblowing*, maka pencegahan *fraud* semakin meningkat.
- 4) Koefisien regresi moralitas individu (b_3) adalah 0,300 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,300 jika nilai variabel X_3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel moralitas individu (X_3) dengan variabel pencegahan *fraud* (Y). Semakin tinggi moralitas individu, maka pencegahan *fraud* semakin meningkat.

b) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625 ^a	.390	.343	1.54536

a. Predictors: (Constant), Moralitas Individu, Pengendalian Internal,

Whistleblowing

b. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data primer yang diolah, 2026

Dari tabel 19 di atas terdapat angka R sebesar 0,625 yang menunjukkan bahwa hubungan antara pencegahan *fraud* dengan ketiga variabel independennya kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya diantara 0,6 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,390 atau 39% ini menunjukkan bahwa variabel pencegahan *fraud* dapat dijelaskan oleh variabel pengendalian internal, *whistleblowing* dan moralitas individu sebesar 39% sedangkan sisanya 61% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

c) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 20 Hasil Uji Parsial (t)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	.979	5.167		.190	.851
Pengendalian Internal	.217	.084	.339	2.597	.013
Whistleblowing	.301	.125	.315	2.411	.021
Moralitas Individu	.300	.132	.286	2.274	.029

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data primer yang diolah, 2026

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari pengendalian internal (X_1), *whistleblowing* (X_2) dan moralitas individu (X_3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud* (Y).

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Tabel 20 menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki tingkat signifikan sebesar 0,013 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai *koefisien* yang bernilai +0,217 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti **H_1 diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Tabel 20 menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing* memiliki tingkat signifikan sebesar 0,021 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai *koefisien* yang bernilai +0,301 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti **H_2 diterima**

sehingga dapat dikatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Tabel 20 menunjukkan bahwa variabel moralitas individu memiliki tingkat signifikan sebesar 0,029 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai +0,300 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti **H_3 diterima** sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan terhadap terjadinya *fraud*. Salah satu bentuk pengendalian internal yang penting adalah pelaksanaan audit internal, yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas unsur-unsur pengendalian internal. Melalui audit internal, potensi kecurangan dapat dideteksi dan diminimalkan sejak dini sehingga risiko terjadinya *fraud* dapat ditekan.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel pengendalian internal adalah penilaian risiko, kemudian diikuti oleh aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, serta lingkungan pengendalian. Sementara itu, indikator yang kontribusinya

paling kecil dalam membentuk variabel pengendalian internal adalah pemantauan (monitoring).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pencegahan *fraud*, kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko menjadi faktor yang paling menentukan. Ketika risiko kecurangan dapat dikenali sejak awal, organisasi dapat merancang langkah - langkah pengendalian yang tepat untuk meminimalkan peluang terjadinya *fraud*. Setelah itu, aktivitas kontrol seperti otorisasi, pemisahan tugas, dan prosedur operasional berperan sebagai mekanisme pengamanan yang langsung membatasi ruang gerak terjadinya kecurangan.

Indikator informasi dan komunikasi juga berperan penting karena sistem informasi yang jelas dan alur komunikasi yang transparan membantu memastikan bahwa kebijakan pengendalian dijalankan dengan baik. Lingkungan pengendalian turut mendukung melalui budaya organisasi, integritas pimpinan, dan komitmen terhadap etika kerja.

Sementara itu, pemantauan kembali menjadi indikator dengan kontribusi paling kecil. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa evaluasi berkala terhadap sistem pengendalian belum berjalan secara optimal. Padahal, monitoring yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian internal tetap berjalan sesuai prosedur dan mampu mendeteksi potensi *fraud* secara berkelanjutan

Salah satu komponen penting dalam pengendalian internal adalah audit internal. Pemeriksaan audit internal berperan dalam mengukur,

menilai, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal yang telah ditetapkan. Melalui audit internal, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan pengendalian, penyimpangan prosedur, serta potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Temuan audit tersebut kemudian menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan perbaikan dan penguatan sistem pengendalian.

Dengan adanya pengendalian internal yang kuat dan didukung oleh fungsi audit internal yang efektif, peluang terjadinya *fraud* dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan konsep pencegahan *fraud* yang menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan, pemisahan fungsi, serta evaluasi rutin terhadap sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan *fraud* secara berkelanjutan di dalam organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan *Fraud hexagon theory*, yang menyatakan pengendalian internal yang kuat secara langsung mampu menekan beberapa elemen utama penyebab *fraud*, yaitu *opportunity*, *capability*, dan *collusion*. Pengendalian internal yang efektif, seperti pemisahan fungsi, sistem otorisasi yang jelas, serta prosedur pengawasan yang ketat, dapat mempersempit kesempatan (*opportunity*) bagi individu untuk melakukan kecurangan. Selain itu, pengawasan yang berlapis dan terdokumentasi dengan baik juga membatasi kemampuan (*capability*) pelaku dalam memanfaatkan celah sistem.

Peran audit internal sebagai bagian dari pengendalian internal juga menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya kolusi (*collusion*). Audit internal yang dilakukan secara independen dan berkelanjutan memungkinkan organisasi untuk mendeteksi pola penyimpangan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dengan adanya fungsi audit internal yang efektif, potensi kerja sama tidak sehat antar pegawai dalam melakukan *fraud* dapat diminimalkan. Pengendalian internal yang berjalan secara konsisten juga berkontribusi dalam menekan unsur rationalization dan arrogance dalam *Fraud hexagon theory*.

Lingkungan pengendalian yang kuat, budaya etika yang baik, serta penegakan sanksi yang tegas dapat membentuk persepsi bahwa tindakan *fraud* tidak dapat dibenarkan dan tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, individu akan lebih sulit untuk membenarkan perilaku curang maupun merasa kebal terhadap pengawasan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan *fraud hexagon theory* bahwa pencegahan *fraud* tidak hanya berfokus pada faktor individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal dan peran audit internal sebagai mekanisme pengawasan yang berkelanjutan dalam organisasi

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qorirah & Syofyan (2024), Musthofa et al. (2025), Anlilua & Rusmita (2023), Aprilianty & Berlian (2025), Holly & E. Daromes (2023), Nur'aini & Arismutia, (2024), Sinaga (2022) serta Syafira & Chariri (2023) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

pencegahan *fraud*. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, seperti pemisahan fungsi, prosedur otorisasi yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan, mampu memperkecil peluang terjadinya kecurangan.

Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil tidak sejalan dengan penelitian ini seperti Penelitian yang telah dilakukan oleh Priandini & Biduri (2023) serta Kuswati, (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, lingkungan organisasi, serta tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal di masing-masing instansi.

Pencegahan *fraud* melalui pengendalian internal dapat dilakukan melalui penilaian risiko, dengan melakukan identifikasi risiko penyimpangan anggaran setiap awal tahun, menyusun peta risiko (risk mapping), serta mengadakan rapat evaluasi berkala untuk menilai potensi celah kecurangan secara rutin, sehingga potensi kecurangan seperti manipulasi anggaran atau penyalahgunaan aset dapat terdeteksi sejak awal sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan.

Selanjutnya, aktivitas kontrol seperti pemisahan tugas, otorisasi berjenjang, dan pemeriksaan dokumen secara berkala secara logis akan mempersempit kesempatan individu untuk melakukan penyimpangan karena setiap tindakan diawasi dan diverifikasi. Informasi dan komunikasi yang jelas serta terdokumentasi dengan baik memastikan setiap pegawai

memahami prosedur kerja dan memudahkan pimpinan melakukan pengawasan berbasis data yang akurat.

Sementara itu, lingkungan pengendalian yang ditandai dengan komitmen pimpinan terhadap integritas dan penegakan disiplin akan membentuk budaya kerja yang tidak mentoleransi kecurangan. Dengan demikian, semakin efektif keempat unsur tersebut diterapkan, semakin kecil peluang dan rasionalisasi untuk melakukan *fraud* karena sistem telah membatasi kesempatan sekaligus membangun kesadaran etis individu.

2. Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif sistem *whistleblowing* yang diterapkan dalam organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan terhadap terjadinya *fraud*. *Whistleblowing system* menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan terstruktur sehingga potensi kecurangan dapat diungkap sejak dini.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel *whistleblowing* adalah aspek struktural (kebijakan dan prosedur). Selanjutnya diikuti oleh aspek operasional (fungsi sistem), sedangkan indikator yang paling kecil kontribusinya adalah aspek perawatan (monitoring dan evaluasi).

Dominannya aspek struktural menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan tertulis, prosedur yang jelas, serta aturan resmi mengenai

mekanisme pelaporan pelanggaran menjadi fondasi utama dalam membangun sistem *whistleblowing* yang efektif. Tanpa dasar regulasi yang kuat, sistem pelaporan tidak memiliki legitimasi dan arah yang jelas. Artinya, organisasi yang memiliki pedoman formal cenderung lebih siap dalam mendorong praktik pelaporan kecurangan.

Aspek operasional berada pada posisi berikutnya, yang berarti fungsi teknis sistem seperti kemudahan akses, kerahasiaan identitas pelapor, serta mekanisme tindak lanjut laporan, juga berperan penting. Sistem yang berjalan secara teknis dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pelapor dan memperbesar kemungkinan terungkapnya tindakan *fraud*.

Sementara itu, aspek perawatan (monitoring dan evaluasi) menjadi indikator dengan kontribusi paling kecil. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa proses evaluasi dan penyempurnaan sistem *whistleblowing* belum dilakukan secara optimal. Padahal, monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan sistem tetap relevan, dipercaya, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika risiko kecurangan yang berkembang.

Penelitian ini sesuai dengan *fraud hexagon theory*, yang menyatakan *whistleblowing system* berperan dalam menekan unsur *opportunity* dan *collusion*. Keberadaan saluran pelaporan meningkatkan risiko terdeteksinya kecurangan, sehingga mempersempit kesempatan pelaku untuk melakukan *fraud*. Selain itu, *whistleblowing system* juga dapat mengurangi praktik kolusi karena adanya kemungkinan pengungkapan oleh pihak internal yang mengetahui penyimpangan tersebut. Sistem ini

juga berkontribusi dalam menekan unsur *rationalization* dan *arrogance*, karena pelaku akan lebih sulit membenarkan tindakannya serta tidak merasa kebal terhadap pengawasan dan sanksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafira & Chariri (2023), Nur'aini & Arismutia, (2024), serta Priandini & Biduri (2023) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas *whistleblowing system* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, sehingga berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil tidak sejalan dengan penelitian ini seperti Penelitian yang telah dilakukan Qorirah & Syofyan (2024), Musthofa et al. (2025), serta Anlilua & Rusmita (2023) yang menemukan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kepercayaan pegawai terhadap sistem pelaporan, kekhawatiran akan adanya pembalasan terhadap pelapor, serta kurangnya perlindungan dan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan. Dalam kondisi tersebut, *whistleblowing system* cenderung bersifat formalitas dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pencegahan *fraud*.

Perlunya organisasi membentuk unit atau mekanisme resmi yang mengatur prosedur pelaporan serta menjamin perlindungan bagi pelapor

agar tercipta rasa aman dan kepercayaan. Sistem harus dijalankan secara nyata melalui penyediaan berbagai saluran pelaporan yang mudah diakses, penanganan laporan secara objektif dan tepat waktu, serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor sehingga fungsi deteksi dini terhadap *fraud* dapat berjalan optimal. Organisasi perlu melakukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkelanjutan, termasuk sosialisasi rutin dan pencegahan tindakan balasan terhadap pelapor, agar sistem *whistleblowing* tetap efektif, kredibel, dan berkelanjutan dalam mendukung upaya pencegahan kecurangan.

3. Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat moralitas individu dalam organisasi, maka semakin besar kemampuan organisasi dalam mencegah terjadinya *fraud*. Individu dengan moralitas yang baik cenderung menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku, sehingga memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan tindakan kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel moralitas individu adalah tahap *post-conventional* (utilitas dan prinsip etika universal). Kemudian diikuti oleh tahap *pre-conventional* (kepatuhan dan hukuman serta individualisme), sedangkan

indikator yang kontribusinya paling kecil adalah tahap *conventional* (kesesuaian individu dan keselarasan sosial).

Dominannya tahap *post-conventional* menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung mendasarkan perilaku moralnya pada prinsip etika universal, nilai keadilan, serta pertimbangan manfaat yang lebih luas. Artinya, keputusan yang diambil tidak semata-mata karena tekanan aturan atau lingkungan, tetapi karena adanya kesadaran internal tentang benar dan salah berdasarkan prinsip moral yang lebih tinggi. Dalam konteks pencegahan *fraud*, individu dengan tingkat moralitas ini cenderung menolak tindakan kecurangan meskipun ada peluang atau tekanan.

Tahap *pra-conventional* berada di posisi berikutnya, yang berarti masih terdapat pertimbangan moral yang didasarkan pada konsekuensi pribadi, seperti menghindari hukuman atau mencari keuntungan tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa faktor sanksi dan imbalan tetap memiliki peran dalam membentuk perilaku.

Sementara itu, tahap *conventional* menjadi indikator dengan kontribusi paling kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap norma sosial atau keinginan untuk diterima lingkungan bukan menjadi faktor utama dalam pembentukan moralitas responden. Dengan kata lain, keputusan moral lebih banyak didorong oleh prinsip pribadi dibanding sekadar mengikuti harapan kelompok.

Walaupun moralitas individu terbukti berperan dalam pencegahan *fraud*, efektivitasnya tetap perlu didukung oleh sistem pengendalian

internal yang kuat, budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, serta komitmen manajemen dalam menegakkan aturan. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan faktor sistem dalam organisasi

Berdasarkan *fraud hexagon theory*, moralitas individu berperan penting dalam menekan unsur *rationalization* dan *arrogance*. Individu dengan tingkat moralitas yang tinggi akan lebih sulit membenarkan (*rationalize*) tindakan *fraud* karena memiliki nilai etika yang kuat. Selain itu, moralitas yang baik juga menekan sikap *arrogance*, yaitu perasaan superior atau kebal terhadap aturan, yang sering menjadi pemicu terjadinya *fraud*. Dengan demikian, moralitas individu menjadi faktor internal yang efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Musthofa et al. (2025), Priandini & Biduri (2023), Holly & E. Daromes (2023), serta Kuswati, (2023) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek etika dan nilai moral individu memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku anti-*fraud* di lingkungan organisasi.

Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil tidak sejalan dengan penelitian ini seperti Penelitian yang telah dilakukan Qorirah & Syofyan (2024), Aprilianty & Berlian (2025), serta Sinaga (2022) yang menemukan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian Holly & E. Daromes

(2023) juga menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan konteks organisasi, budaya kerja, serta lemahnya sistem pengendalian dan penegakan sanksi, sehingga moralitas individu tidak selalu tercermin dalam perilaku nyata.

Penyelenggaraan pelatihan etika, diskusi studi kasus, penguatan pendidikan karakter, serta membangun kepemimpinan yang berintegritas agar kesadaran moral tumbuh dari dalam diri pegawai. Perlu diterapkan sanksi tegas dan konsisten bagi pelaku *fraud*, jaminan perlindungan bagi pelapor, serta pemberian apresiasi bagi pegawai yang berintegritas. Organisasi perlu memperkuat kode etik, melakukan sosialisasi nilai anti-*fraud*, serta membangun budaya kerja yang menjunjung kejujuran dan tanggung jawab bersama.